



# KLIPING

## BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

- Bangka Pos
- Babel News
- Rakyat Pos
- Babel Pos
- Radar Bangka
- Lainnya: \_\_\_\_\_

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	✓																							

# BPK Temukan Kunker Fiktif DPR

■ Modus Gunakan Foto Kunker Yang Sama Berkali-Kali

■ Total Penyimpangan Dana Capai Rp 945, 465 M

### JAKARTA, BANGKA POS-

-- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan potensi kerugian negara sebesar Rp 945.465.000.000 dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Laporan ini dipastikan, sudah diterima oleh Sekretaris Jenderal DPR dan diteruskan ke 10 fraksi di DPR.

Temuan ini terungkap dalam surat Fraksi PDIP bernomor 104/FPDIP/DPR-RI/2016 yang ditandatangani sekretaris fraksi Bambang Wuryanto. Surat yang dimaksud tertulis; Atas ketentuan Peraturan

Tata Tertib DPR RI Pasal 211 ayat (6) dan surat Setjen DPR RI tentang dirugukannya keterjadiannya kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI dalam melaksanakan tugasnya, sehingga potensi negara dirugikan Rp945.465.000.000

Oleh karenanya kepada Yth Bapak/Ibu anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI diharapkan melengkapi laporannya. Selanjutnya laporan tersebut diharapkan sudah diterima fraksi paling lambat tanggal 25 Mei 2016.

"BPK melakukan audit dan melakukan uji sampling. Ternyata ada laporan (kunjungan kerja) yang

tidak memenuhi persyaratan. Pelaporan yang tak memenuhi syarat ini artinya susah diverifikasi, apakah memang kegiatan kunker yang dilakukan anggota Dewan itu bisa dibuktikan atau tidak," Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno, Kamis (12/5) menjelaskan.

Hendrawan mengakui, sejumlah anggota DPR selama ini banyak yang kurang serius membuat laporan pertanggungjawaban kunjungan ke dapilnya. Ada pula anggota DPR yang hanya memercayakan kegiatan kunker kepada tenaga ahli. Alhasil, foto

kegiatan yang sama digunakan berkali-kali dalam setiap laporan kunker. "Artinya, aktivitas anggota Dewan itu menurut audit BPK tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan," ia memastikan.

Ia memastikan, Fraksinya di DPR sudah menyurati anggota untuk menyusun

ulang laporan kegiatan kunkernya selama satu tahun terakhir. Laporan tersebut harus diterima Fraksi pada 25 Mei mendatang.

"Anggota Dewan kalau reses gunakan sebaik-baiknya. Kalau melakukan sosialisasi empat pilar, sosialisasi UU, gunakanlah forum itu, kegiatannya ada

gitu lho, jangan stempel saja," ujar dia.

Fraksi NasDem akan melakukan pengecekan terhadap laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana terdapat keraguan dalam kunjungan kerja anggota dewan sehingga potensi negara dirugikan Rp945.465.000.000

"Kami akan check substansi laporan BPK tersebut dan akan mengambil kebijakan strategis terkait hal tersebut termasuk langkah perbaikan kunjungan kerja anggota pada waktu yang akan datang termasuk reses anggota," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G (tribun/fer/ikg/dtc)



# KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

- Bangka Pos
- Babel Pos
- Babel News
- Radar Bangka
- Rakyat Pos
- Lainnya: \_\_\_\_\_

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

## KPK Harus Selidiki

FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak KPK mengusut tuntas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR. Potensi kerugian negara dari dugaan kunker fiktif itu mencapai Rp 945 miliar lebih

"Kalau menurut kita harus diungkap dan harus diproses hukum, KPK harus bergerak, aktor utamanya harus diungkap," kata Koordinator bidang Advokasi dan

Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Apung Widadi, Kamis (12/5).

Menurut Apung, kunker fiktif semacam ini sudah berulang kali terjadi. Fitra juga mencatat sejumlah kejanggalan dalam laporan kunker DPR.

"Hasil audit itu sebenarnya sudah berulang kali terjadi kunker fiktif semacam itu dan terus terulang. Memang kunker fiktif itu diduga untuk bancakan, jadi harus diusut tuntas kalau perlu

periksa semuanya. Kalau memang terbukti mending bubarkan saja," katanya.

KPK memastikan akan mempelajari temuan BPK terkait dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR yang merugikan keuangan negara hingga Rp 945 miliar. Temuan itu akan ditelaah terlebih dulu. "KPK akan melihat hasil temuan itu dulu karena sejauh ini baru melihat dari pemberitaan saja," ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati. (tribun/ter/dtc)